
Analisis Keterbatasan Digitalisasi Arsip Menuju Efisiensi Tata Kelola Pada Subbagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Badung

I Gusti Ayu Tri Devy Wijayanti¹, Komang Adi Sastra Wijaya²

^{1,2}Universitas Udayana

E-mail: igatridevyw@gmail.com¹, sastra_wijaya@unud.ac.id²

Article History:

Received: 04 Maret 2026

Revised: 16 Maret 2026

Accepted: 28 Maret 2026

Keywords: Digitalisasi Arsip, Efisiensi Tata Kelola, UTAUT, Keterbatasan SDM, Fasilitas Pendukung

Abstract: Efisiensi tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) merupakan prasyarat fundamental layanan publik optimal, yang saat ini sangat bergantung pada keberhasilan digitalisasi arsip. Meskipun terdapat kemajuan signifikan di tingkat provinsi, penelitian ini memfokuskan pada kesenjangan dan kendala yang menghambat proses digitalisasi di tingkat Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan lima informan kunci (pegawai arsip dan tenaga ahli) di Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, dengan analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman. Penelitian ini menggunakan kerangka *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)* untuk mengevaluasi perspektif pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam digitalisasi arsip berpusat pada dua aspek: kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan Fasilitas Pendukung. Disimpulkan bahwa kunci untuk mencapai efisiensi adalah melalui implementasi strategi yang berfokus pada peningkatan fasilitas teknis yang memadai dan pelatihan SDM yang intensif dan berkelanjutan guna menjembatani kesenjangan digitalisasi dan memastikan adopsi sistem secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menerapkan UTAUT dalam konteks kearsipan publik dan menghasilkan rekomendasi praktis untuk kebijakan e-government di daerah.

PENDAHULUAN

Efisiensi merupakan salah satu prinsip utama dari tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tata kelola pemerintahan yang efisien ini merupakan prasyarat fundamental bagi terciptanya layanan publik yang optimal dan berkualitas. Efisiensi diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan sumber daya melalui digitalisasi proses, percepatan pelayanan, serta pengurangan biaya dan hambatan birokrasi. Oleh sebab itu, dalam hal ini teknologi berperan penting dalam upaya menciptakan digitalisasi khususnya dalam bidang kearsipan. Dalam Pasal 3 UU No. 43 Tahun 2009, menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan salah satunya bertujuan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Pengelolaan arsip yang berkualitas menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi di instansi pemerintahan. Seiring dengan perkembangan teknologi, peningkatan kualitas pengelolaan arsip kini semakin bergantung pada penerapan digitalisasi.

Kemajuan teknologi saat ini menciptakan berbagai proses administrasi dapat berjalan lebih efisien melalui transformasi digital. Digitalisasi sendiri merupakan proses mengubah berbagai bentuk informasi, seperti buku, gambar, video, rekaman audio ke dalam format yang dapat diproses oleh sistem komputer (Puspitasari et al., 2023). Data dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat digitalisasi arsip pada tingkat provinsi telah mencapai 79% berdasarkan hasil audit pengelolaan arsip elektronik tahun 2023. Namun, capaian tersebut masih jauh berbeda dengan tingkat digitalisasi di Kabupaten/Kota yang baru mencapai 33%. Perbedaan ini menggambarkan adanya kesenjangan digitalisasi arsip. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam proses digitalisasi arsip di daerah, sehingga upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien belum dapat berjalan secara optimal.

Meskipun upaya digitalisasi arsip di tingkat provinsi sudah menunjukkan angka yang cukup baik, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada prinsip efisiensi. (Komna & Mpungose, 2024) telah menyatakan bahwa transformasi digital di sektor publik seringkali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan resistensi perubahan. Studi di Afrika Selatan oleh SITA ini menegaskan bahwa “hambatan sistemik, termasuk infrastruktur yang sudah usang dan keengganan untuk berubah, secara signifikan menghambat transformasi digital”. Selain itu, temuan ini juga diperkuat oleh (Hazineh, Eleyan, & Alkhateeb, 2022) yang menyatakan bahwa penerapan e-Government di negara berkembang menghadapi berbagai tantangan, seperti infrastruktur yang terbatas, adanya praktik korupsi, interoperabilitas, faktor kebijakan, hingga pendanaan. Dalam konteks Indonesia pada bidang kearsipan, penelitian yang dilakukan oleh (Darmansah et.al, 2023) menyatakan bahwa proses beralih dari arsip fisik ke arsip digital masih menemui berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah penolakan atau kurangnya dukungan dari manajemen, hingga kekhawatiran terkait keamanan dan biaya penerapan sistem arsip digital. Keterbatasan tersebut membuat upaya digitalisasi sering tidak terkoordinasi dengan baik, akibatnya, muncul kesenjangan yang cukup besar antara efisiensi yang diharapkan dari digitalisasi dan kondisi nyata pengelolaan pemerintahan di lapangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya sudah menemukan banyak masalah dalam upaya pemerintah mendigitalisasi arsip, seperti infrastruktur yang masih kurang, biaya yang mahal, ataupun sistem manajerialnya. Namun, penelitian terdahulu tersebut sebatas menjelaskan apa masalahnya, tanpa menjelaskan kenapa masalah itu terjadi dari sudut pandang pegawai yang menggunakan sistem digital tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan teori UTAUT (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*), yang dimana dengan teori UTAUT, peneliti akan menggali lebih dalam dengan faktor-faktor UTAUT (seperti apakah sistemnya mudah atau sulit dipakai dan apakah atasan mendukung) dan memberikan solusi untuk mengatasi kendala yang ada. Hasilnya penelitian ini tidak hanya menambah ilmu terkait penerapan UTAUT di bidang kearsipan publik, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang spesifik untuk membantu pemerintah untuk benar-benar mencapai efisiensi yang diharapkan dari digitalisasi.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada dua aspek utama: (1) kendala dalam digitalisasi arsip dan (2) strategi yang dilakukan dalam mengatasi keterbatasan

digitalisasi arsip menuju efisiensi tata kelola pemerintahan di Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Setda Badung dalam meningkatkan kualitas pengelolaan arsip serta memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan sarana prasarana dan pengembangan kompetensi SDM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk memberikan gambaran terkait keterbatasan digitalisasi arsip menuju efisiensi tata kelola pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Informan dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu individu yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan arsip. Sebanyak 5 informan dipilih, terdiri dari 3 pegawai arsip dan 2 tenaga ahli di Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahi, Dan Kepegawaian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur untuk mendapatkan pendapat ahli terkait kendala, dan strategi dalam upaya digitaliasi arsip menuju efisiensi tata kelola pemerintahan, pengamatan secara langsung dilakukan di lokasi untuk mengamati bagaimana pengelolaan arsip yang dilakukan sehingga mengetahui apa yang menjadi keterbatasan digitalisasi arsip, serta melakukan tinjauan literatur untuk menelaah aturan terkait digitalisasi arsip, pedoman teknis mengenai pelaksanaan digitalisasi arsip.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis menurut Miles dan Huberman (1984, dikutip dalam Sugiyono, 2013), yang dimana memiliki 3 tahapan yaitu reduksi data, yaitu proses penyeleksian, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah untuk menentukan tema dan pola kunci; tahapan kedua yaitu penyajian data, yakni pemaparan data yang terorganisis, umumnya dalam bentuk naratif, untuk memfasilitasi analisis; dan ketiga, penarikan dan verifikasi kesimpulan, di mana pemuan awal yang bersifat sementara divalidasi dan dianggap kredibel jika didukung secara konsisten oleh bukti yang sah dari data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Digitalisasi Arsip

Pembahasan ini membahas hasil wawancara terkait penerapan sistem kearsipan dan berbagai kendala yang dihadapi dengan menggunakan teori UTAUT dari Venkatesh et al. (2003). Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan meliputi *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, dan *facilitating conditions*.

1. *Perfomance Expectancy*

Pada indikator *Perfomance Expectancy*, diketahui bahwa sistem kearsipan sudah memiliki alur kerja yang cukup jelas. Prosesnya dimulai dari pemilahan surat berdasarkan tahun, kemudian pemberian kode sesuai dengan jenis surat. Setelah itu, data surat dicatat dan diinput ke dalam komputer. Arsip fisik juga akan disimpan ke dalam map dan diletakkan di *filling cabinet* sebagai arsip aktif yang sering digunakan dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Selanjutnya, arsip yang telah melewati jangka waktu tertentu (sekitar kurang lebih 2 tahun) akan diberi nomor ulang, lalu dimasukkan ke dalam box arsip, dan dipindahkan ke ruang *record center* sebagai arsip inaktif. Tahap terakhir dari pengarsipan yakni pemusnahan, yaitu arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna sesuai dengan jadwal retensi yang berlaku.

Pada dasarnya, keberadaan prosedur kearsipan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi

kerja pegawai. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya pencatatan arsip menggunakan media komputer sebagai bentuk penyesuaian terhadap sistem digital. Namun, dalam pelaksanaannya, ekspektasi tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih terhadap berbagai kendala operasional di lapangan. Salah satu kendala yang paling sering muncul adalah kesulitan dalam mencari kode arsip yang sesuai dengan jenis permasalahan surat, sehingga proses pengarsipan menjadi lambat.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan narasumber. Bu Tami menyampaikan, “*Kalau kendala di proses pengarsipan itu di bagian mencari kode arsipnya, karena kodenya banyak sedangkan permasalahan suratnya beda-beda.*” Senada dengan itu, Bu Made juga menyatakan, “*Kendala yang paling utama sih itu di mencari kode arsip, tapi kalau kendala lain itu biasanya lupa mencatat surat masuk.*”

Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada sistem atau prosedur saja, tetapi juga berkaitan dengan faktor Sumber Daya Manusia (SDM), seperti kurangnya ketelitian, serta belum optimal pada keterampilan dalam mengelola kode arsip. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan di lapangan, di mana sistem yang seharusnya mempermudah pekerjaan justru belum memberikan manfaat yang maksimal dalam praktiknya.

2. Effort Expectancy dan Facilitating Conditions

Effort expectancy didefinisikan sebagai tingkat kemudahan yang dirasakan terkait dengan penggunaan suatu sistem (Venkatesh et al., 2003). Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa tingkat Effort expectancy masih tergolong cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh masih adanya berbagai kendala terkait fasilitas dan kurangnya dukungan teknis yang memadai. Salah satu kendala utama yang diungkapkan pada saat wawancara adalah gangguan teknis, dimana komputer yang digunakan untuk mendukung pengarsipan digital sering mengalami error atau blank, selain itu jaringan internet cenderung lambat. Kondisi tersebut mengakibatkan pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan dengan cepat justru membutuhkan waktu yang lebih lama dan butuh tenaga ekstra. Selain itu, dukungan teknis yang masih kurang responsif juga menghambat kelancaran pekerjaan arsip.

Berdasarkan keterangan dari narasumber, teknisi sering datang untuk mengecek tanpa langsung melakukan perbaikan, sehingga kerusakan tidak segera teratasi. Jika dilihat dari perspektif teori UTAUT, ketika usaha yang dibutuhkan untuk menggunakan sistem dirasa cukup sulit, maka niat pengguna untuk memanfaatkan sistem tersebut akan cenderung menurun. Dalam kondisi seperti ini, pegawai cenderung akan kembali ke cara manual karena dianggap lebih mudah dan tidak bergantung pada teknologi yang sering bermasalah. Oleh karena itu, hambatan teknis dan lemahnya dukungan fasilitas menjadi salah satu faktor utama yang menghambat adopsi sistem digital dalam pengelolaan arsip.

Indikator *Facilitating Conditions* (kondisi yang memfasilitasi) lain yang ditemukan peneliti adalah belum tersedianya arsiparis, sehingga pegawai arsip yang ada belum memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 156 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang diperoleh dari: a. Pendidikan formal di bidang kearsipan atau b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih, I., Putra, P., & Nurdiansyah, A. (2025), yang menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas seperti tidak terdapat tenaga arsiparis hingga komputer yang masih sangat terbatas akan berdampak pada lambatnya proses digitalisasi arsip.

3. Sosial Influence

Social influence didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana seseorang memersepsikan bahwa

orang-orang penting di sekitarnya, seperti atasan percaya bahwa ia seharusnya menggunakan sistem baru (Venkatesh et al., 2003). Berdasarkan hasil wawancara, memang tidak ditemukan pernyataan secara langsung mengenai adanya dorongan dari atasan untuk menggunakan sistem kearsipan digital. Namun keberadaan prosedur kearsipan yang terstruktur, seperti adanya pengkodean hingga pemusnahan arsip menunjukkan bahwa secara tidak langsung terhadap kebijakan dan arahan dari pihak terkait untuk menerapkan sistem tersebut, dengan kata lain sudah ada bentuk dukungan yang mengarahkan pegawai untuk mengikuti prosedur yang ada.

Meski demikian, pengaruh sosial tersebut belum memberikan dampak yang maksimal dalam praktiknya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan kearsipan yang optimal serta kondisi fasilitas yang masih belum memadai. Ketika manajemen mengharapkan pegawai menggunakan sistem, tetapi tidak diiringi dengan pemberian dukungan berupa sarana yang layak dan peningkatan kemampuan SDM, maka akan muncul kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan. Akibatnya, sistem yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal justru belum dijalankan dengan optimal oleh pegawai kearsipan.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala yang menghambat digitalisasi arsip adalah SDM dan Fasilitas pendukung arsip digital. Pada aspek Sumber Daya Manusia disini masih kurang kemampuannya untuk siap sepenuhnya untuk mengelola arsip digital, seperti temuan penelitian tersebut bahwa tingkat keterampilan dan ketelitian pegawai masih rendah sehingga hal ini menjadi kendala yang menghambat proses digitalisasi arsip. Lalu terdapat fasilitas yang masih kurang memadai, temuan penelitian menemukan bahwa fasilitas pendukung arsip digital seperti PC dan jaringan internet dikemukakan masih belum optimal, sehingga hal tersebut juga menjadi kendala dalam proses arsip digital. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, D. P., & Putra, P. (2024), yang menyatakan bahwa terdapat tiga kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip berbasis elektronik meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Perangkat, dan Ruangan.

Strategi Mengatasi Keterbatasan Digitalisasi Arsip

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyampaikan bahwa peningkatan yang paling diperlukan ke depan adalah peningkatan pada aspek fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini diperkuat oleh pernyataan narasumber. Bu Astiti menyampaikan, *“Semoga kedepannya ada peningkatan fasilitas kayak penambahan komputer, terus pelatihan-pelatihan arsip itu sering diadakan.”*

Hal ini tentunya sudah menunjukkan adanya kesadaran pegawai terhadap pentingnya pengelolaan arsip yang lebih efisien dan efektif, meskipun pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sarana pendukung dan kemampuan teknis yang belum memadai. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Sarana dan Prasana

Peningkatan dalam hal sarana dan prasarana penunjang arsip digital, seperti komputer/PC, jaringan internet, scanner untuk mengubah dokumen fisik sangat perlu ditingkatkan dalam hal ini. Komputer/PC yang memiliki spesifikasi yang stabil agar tidak error, kemudian jaringan internet dengan kecepatan dan stabilitas yang baik agar tidak menghambat akses dan kegiatan transfer data, hingga mesin scanner dengan fungsi yang baik dan cepat terutama jika terdapat arsip fisik yang harus didigitalisasi. Dengan hal ini, kegiatan arsip akan terasa lebih cepat dan efisien dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai. Selain itu, dukungan dari manajemen juga harus diperkuat, melalui penyediaan bantuan teknis yang lebih responsif, sehingga jika terjadi kendala dapat segera ditangani.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) disini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan secara intensif mengenai bagaimana sistem kearsipan digital seperti SRIKANDI dan e-arsip itu beroperasi dengan baik. Selain itu, pelatihan dengan penekanan pada keterampilan khusus, seperti pengkodean arsip hingga penerapan prosedur penyimpanan digital yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan arsip.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmansah, T., Nur, A. M., Suryadi, H. S., & Nurarfiansyah, L. T. (2024), bahwa solusi yang efektif dalam pengembangan arsip era digital dengan kendala yang terletak pada rendahnya kemampuan SDM dalam teknologi informasi adalah dengan memberikan pelatihan dan pengembangan SDM, melalui diadakannya seminar dan pelatihan yang intensif kepada pegawai untuk meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi kearsipan digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala digitalisasi arsip di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung menuju efisiensi tata kelola pemerintahan menggunakan kerangka UTAUT, dan menemukan bahwa pencapaian efisiensi terhambat secara signifikan oleh dua faktor utama: kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan Fasilitas Pendukung. Keterbatasan SDM tercermin pada rendahnya keterampilan teknis dan ketelitian pegawai, khususnya dalam pengaplikasian kode arsip, yang menurunkan ekspektasi kinerja (*Performance Expectancy*) sistem. Sementara itu, keterbatasan fasilitas seperti seringnya gangguan pada perangkat PC dan jaringan internet yang lambat menyebabkan sistem dianggap sulit (*Effort Expectancy* rendah), mendorong pegawai kembali ke proses manual dan menghambat adopsi penuh. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kunci untuk mencapai efisiensi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi arsip adalah dengan segera mengimplementasikan strategi komprehensif yang berfokus pada peningkatan fasilitas teknis yang memadai dan pelatihan SDM yang intensif dan berkelanjutan untuk memastikan kesiapan operasional dan adopsi sistem secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2024, 29 Mei). *Siaran pers nomor HM.02.07/10/2024: Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kearsipan Tahun 2024*. ANRI. <https://www.anri.go.id/download/siaran-pers-nomor-hm.02.07102024-tentang-rapat-koordinasi-nasional-bidang-kearsipan-tahun-2024-1717226259>
- Darmansah, T., Nur, A. M., Suryadi, H. S., & Nurarfiansyah, L. T. (2024). Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan arsip di era digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 16-20.
- Dewi, Y. S. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Sebagai Pilar Good Governance: Refleksi Tata Kelola Pemerintah Daerah. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 23(1), 53-63.
- Hazineh, S. A., Eleyan, D., & Alkhateeb, M. (2022). E-government: Limitations and challenges: A general framework for to consider in both developed and developing countries. *Int. J. Sci. Technol. Res*, 11(1).
- Komna, L., & Mpungose, S. (2024). Enhancing digital transformation strategies: a framework for SITA. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy* (2687-2293), 6(4), 235-252.
-

- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Puspitasari, N., Septiarini, A., Hakim, M. I., Afifah, D. N., Salsabila, Z., Fornia, D. D. E., ... & Hanif, A. L. (2023). Teknologi Arsip Digital sebagai Upaya Peningkatan Layanan Administrasi di Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda. *Inovasi Teknologi Masyarakat (INTEKMAS)*, 1(1), 8-14.
- Purwaningsih, I., Putra, P., & Nurdiansyah, A. (2025). Analisis Kesiapan SDM Dalam Pengelolaan Arsip Layanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan. *Journal of GLAM Terekam Jejak*, 1(1), 12-24.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38788/uu-no-43-tahun-2009>
- Sari, D. P., & Putra, P. (2024). Tantangan digital dalam implementasi manajemen data arsip berbasis elektronik. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, 1(1), 1-12.
-